

Sebelum Tinggalkan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, Edy Pratowo Persembahkan Wajar Tanpa Pengecualian ke Enam



kalteng.antaranews.com

KALAMANTHANA, Pulang Pisau – Menjelang pelantikan H Edy Protowo sebagai Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali mempersembahkan torehan Prestasi bagi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (Pekab Pulpis).

Dimana, Sabtu (22/05/2021) Pekab Pulpis dibawah Pimpinan Bupati H Edy Pratowo dan wakil bupati Pudjirustaty Narang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ke enam kali berturut-turut atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau tahun 2020.

“Syukur Alhamdulillah kita kembali mendapatkan predikat opini WTP dari BPK RI dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkecil atau paling sedikit dari 13 kabupaten 1 kota se Provinsi Kalimantan Tengah, dan ini yang ke enam kalinya secara berturut-turut,” kata Edy Pratowo usai menerima LHP BPK RI, Sabtu (22/5/2021) di Palangka Raya, via WhatsApp.

Penyerahan predikat opini WTP ini dilakukan di BPK Provinsi, Palangka Raya, dan diterima oleh Bupati Pulang Pisau H Edy Pratowo didampingi Wakil Bupati Pulpis dan Ketua DPRD Pulpis.

Menurutnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI adalah predikat yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

“Opini WTP diterbitkan jika laporan keuangan dianggap terbebas dari kesalahan penyajian informasi secara material, dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum,” ucapnya.

Dengan capaian opini WTP ini, lanjut Edy, membuktikan bahwa Pemkab Pulang Pisau dianggap mampu mengelola keuangan serta mempertanggungjawabkan anggaran sesuai dengan ketentuan aturan.

Ia juga mengungkapkan opini WTP cukup penting bagi pemerintah daerah sebagai tolok ukur pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di tiap instansi. “Menurut kepala BPK perwakilan Kalteng temuan terkecil se kalteng,” tutupnya.

Rencananya Calon Wakil Gubernur Kalteng terpilih ini akan dilantik 25 Mei 2021 ini berharap agar kepala daerah selanjutnya tetap mempertahankan prestasi yang telah diraih selama enam tahun berturut-turut itu.

Sumber berita:

1. <https://www.kalamanthana.id>, Sebelum Tinggalkan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, Edy Pratowo Persembahkan Wajar Tanpa Pengecualian ke Enam, Minggu, 23 Mei 2021;
2. Harian Kalteng Pos, Terus Pertahankan Opini WTP, Jumat, 28 Mei 2021.

Catatan:

Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 ditegaskan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Tata Tertib masing-masing lembaga perwakilan.

Pada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007, disebutkan jenis pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Tujuan suatu pemeriksaan menentukan jenis pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut. PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.